MUNGGAI: *Jurnal Ilmu Perikanan & Masyarakat Pesisir*
Volume 12, Nomor 02 , September 2026 **ISSN: 2549-7502**
E-ISSN: 2828-8459

MENDORONG *POLICY LEARNING* PADA KEBIJAKAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) DI BANDA NEIRA

FOSTERING POLICY LEARNING IN THE NATIONAL STRATEGIC TOURISM AREA (KSPN) OF BANDA NEIRA

Daffa Naufal Nurrahmad[1)]
[1]Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
***Email Penulis Korespondensi:** nurrahmaddaffa@gmail.com

Abstrak

Selama ini praktik lazim penilaian atas implementasi kebijakan publik lebih banyak menitikberatkan pada proses evaluasi formal –kesesuaian antara input dan ouput- daripada mempraktikkan policy learning. Oleh karena itu, dengan mengkaji upaya untuk mendorong policy learning pada kebijakan KSPN di Banda Neira, Maluku, yang difasilitasi oleh KKN Tematik-Kolaboratif UGM, tulisan ini bertujuan untuk merefleksikan praktik policy learning yang berlangsung. Policy learning dalam siklus kebijakan publik dipahami sebagai proses saling belajar yang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai beneficiaries, tetapi juga untuk menguji government learning capacity. Policy learning berfungsi sebagai kacamata untuk melihat siklus kebijakan publik secara komprehensif supaya sebuah kebijakan tidak hanya dievaluasi berdasarkan output dan outcome saja. Dengan menggunakan metode studi kasus, data riset dikumpulkan melalui wawancara, Focus Group Discussion, observasi, dan studi pustaka. Temuan riset mengkonfirmasi bahwa kecenderungan penilaian implementasi kebijakan KSPN lebih berfokus pada keselarasan input dan output serta tertib administratif. Kendati demikian, upaya untuk mendorong policy learning telah membuka pandangan baru menuju reformulasi kebijakan yang lebih tanggap masalah. Akan tetapi, inisiasi policy learning tersebut harus berhadapan dengan limitasi, seperti jangka waktu yang terlalu pendek untuk mendorong munculnya critical juncture. Singkat kata, upaya untuk mendorong policy learning pada kebijakan KSPN di Banda Neira yang berorientasi pada masalah (problem-oriented) dan tindakan (action-oriented) membuka peluang baru bagi reformulasi kebijakan meskipun membutuhkan usaha yang lebih berkesinambungan..

Kata kunci: *Policy Learning*, Kawasan Strategis Nasional, Sektor Pariwisata

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

PENDAHULUAN

Riset ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana *policy learning* pada kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Banda Neira, yang difasilitasi oleh kegiatan Kuliah Kerja Nyata tematik-kolaboratif (selanjutnya disebut: KKN), berhasil merubah cara memahami dan menilai dari sebuah implementasi kebijakan. Selama ini, penilaian atas kebijakan sering kali hanya berkutat pada tanggung jawab administratif atau tidak lebih dari bentuk "wajib lapor". Proses evaluasi kebijakan seperti ini cenderung berkutat pada aspek administratif, yakni keselarasan antara *input* yang telah dituliskan dalam kebijakan dengan *output* atau laporan kebijakan. Kecenderungan tersebut seringkali mengakibatkan sebuah kebijakan meninggalkan celah dalam mendefinisikan masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan beserta aktor-aktor yang relevan. Padahal proses evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) seharusnya berfungsi untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta memberikan dasar bagi pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan proses implementasi kebijakan seringkali berhadapan dengan kurangnya kolaborasi antar aktor, kurang jelasnya *rule of the game*, serta lemahnya komitmen politik atau *political will* akibat adanya *missing-link* dalam memahami konteks kebijakan atau *policy context*.

Oleh karena itu, proses *policy learning* perlu didorong karena memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang konstruktif, identifikasi solusi kreatif, serta pembentukan konsensus yang dapat meningkatkan legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan yang sedang dievaluasi. Tanpa mekanisme learning, sebuah kebijakan cenderung berisiko menjadi tidak adaptif dan responsif terhadap perkembangan di lapangan. Selain itu, *policy learning* menjadi aspek fundamental penting dari roda kebijakan publik karena berperan untuk memfasilitasi pendalaman pengetahuan tentang akar permasalahan kebijakan, interdependensi antar faktor, dan potensi konsekuensi dari berbagai pilihan kebijakan.

Atas dasar itu, UGM kemudian menginisiasi KKN di KSPN Banda Neira, Maluku. Selain bentuk wujud nyata dari integrasi tridharma perguruan tinggi, KKN ini bertujuan untuk mendorong reformulasi kebijakan yang lebih strategis, transparan, dan akuntabel. Lebih khusus, KKN ini bertujuan untuk mengaktivasi *policy learning* dalam konteks kebijakan KSPN di Banda Neira. Pengembangan KSPN sendiri digadang-gadang mampu mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar ekonomi utama (Setiawan et al., 2023).

Akan tetapi, selama ini, terjadi kealpaan untuk menilai dampak dengan tujuan kawasan strategis pariwisata dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan terhadap kebijakan penetapan KSPN Banda Neira. UU tersebut menyebutkan bahwa kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Potensi sumber daya sektor pariwisata Banda Neira, mulai dari wisata alam berupa gunung dan laut, jejak kekayaan perkebunan pala, hingga situs-situs bersejarah yang menjadi saksi imperialisme dan kolonialisme, belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Kehadiran sektor pariwisata dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak serta belum memberdayakan masyarakat lokal sebagai prioritas. Masyarakat hanya menikmati dampak sektor pariwisata pada waktu-waktu

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

tertentu, seperti pada kuartal terakhir tiap tahun karena kondisi laut sedang bersahabat serta terdapat festival atau acara-acara adat yang diselenggarakan.

Upaya menjadikan Banda Neira sebagai salah satu KSPN memang relevan dengan potensi pariwisata daerah tersebut yang sangat beragam, mulai dari wisata alam, sejarah, hingga budaya lokal. Banda Neira telah lama eksis di mata internasional karena dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah, terutama pala, sekaligus menjadi saksi kolonialisme di Indonesia. Oleh karena itu, Banda Neira digadang-gadang menjadi ikon pariwisata Indonesia disamping daerah-daerah yang telah umum dikenal, seperti Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Raja Ampat, Bukit Tinggi, dan Komodo. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pariwisata, turut merespon melalui peraturan turunan PP Nomor 50 Tahun 2011. Hal ini diwujudkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Maluku 2019-2024, yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Peraturan tersebut memproyeksikan Banda Neira sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta kawasan unggulan pariwisata Laut Banda. Dengan berbagai kekayaan sumber daya alam tersebut, Banda Neira diprioritaskan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku sehingga kebijakan pada sektor pariwisata tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian wilayah dan mengurangi ketimpangan antar wilayah (Herman, 2024).

Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan kunci berikut: "*Sejauh mana upaya aktivasi proses policy learning untuk menilai implementasi KSPN di Banda Neira mampu mendorong perubahan cara memahami dan keyakinan atas kebijakan tersebut?*"

LITERATURE REVIEW

Riset-riset terdahulu telah cukup banyak yang membahas terkait potensi pariwisata, kebijakan KSPN, pariwisata Banda Neira, serta analisis kebijakan pariwisata. Akan tetapi, mayoritas riset tersebut cenderung minim yang fokus pada *Policy learning* dalam proses kebijakan publik. Seperti yang akan dibahas pada paragraf-paragraf berikut. Pertama, terkait dengan pariwisata Banda Neira. Riset Pentury et al. (2023), berfokus pada optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengakselerasi kesadaran wisata berbasis potensi daerah Banda Neira. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam riset tersebut menyasar hal-hal seperti sosialisasi, penyuluhan, serta pemetaan hasil studi lapangan. Riset Dimuru (2023), membahas pengembangan pariwisata pada aspek destinasi wisata spesifik, yakni pantai di Pulau Hatta, Banda Neira. Pembahasannya cenderung mengarah ke variabel untuk mengukur dimensi pengembangan destinasi wisata, seperti daya tarik wisata, fasilitas pendukung, kemudahan akses, dan keramah tamahan. Selain itu, riset yang dilakukan Balai Arkeologi Provinsi Maluku juga berfokus pada situs peninggalan sejarah kolonial untuk preservasi cagar budaya (Surbakti, 2021). Riset tersebut lebih banyak membahas pengelolaan warisan budaya di Banda Neira yang belum dikelola secara maksimal serta tidak mengindahkan manajemen berbasis nilai penting dan bertendensi pelestarian sebagai cikal bakal cagar budaya. Riset Refualu et al. (2024), turut membahas analisis isu spesifik, yakni isu strategis Banda Neira sebagai wilayah pesisir.

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

Fokusnya pada pola pemanfaatan ruang, potensi dampak, serta potensi konflik kepentingan wilayah Banda Neira.

Kedua, riset-riset yang membahas kebijakan KSPN juga belum banyak yang menganalisis proses pembelajaran dalam kebijakan publiknya. Riset Masrurun & Nastiti (2023), berfokus pada analisis *stakeholders* terkait KSPN di Wonosobo (tercatat dalam dokumen KSPN: Dieng dan sekitarnya). Riset tersebut lebih detail membahas *stakeholders* yang seharusnya terkait serta apa saja peran, sumber daya, dan pengaruh atau kepentingannya. Riset Amri et al. (2023), membahas strategi peningkatan PAD melalui kebijakan KSPN di Kabupaten Bengkalis menggunakan analisis SWOT. Hasilnya masih banyak ruang optimalisasi yang belum didorong pemerintah sehingga KSPN di Kabupaten Bengkalis belum maksimal implementasinya. Riset Eliza et al. (2023), membahas KSPN di Padang yang memberikan catatan bahwa pelaksanaannya masih meninggalkan berbagai pekerjaan rumah. Contohnya belum terkoordinasi dengan baik, kurangnya kesiapan di tingkat kelurahan, dan tata kelola pariwisata yang belum menerapkan prinsip transparansi. Sementara riset Wiryasa et al. (2018), berfokus pada analisis konflik kelembagaan dalam tata ruang KSPN Kawasan Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya. Tulisan ini spesifik dibatasi ruang lingkup indikator penyelenggaraan penataan ruang, yakni tugas, wewenang, dan kedudukan, terhadap aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Riset Mugni & Murdana (2023), juga menganalisis kebijakan KSPN dengan fokus lokasi di Lombok Timur menggunakan analisis potensi desa wisata. Desa yang dijadikan studi kasus, Jerowaru, didorong untuk menjadi percontohan akselerasi KSPN karena ragam sumber daya yang dimiliki namun belum dioptimalisasi *stakeholders* terkait.

Ketiga, riset-riset sektor pariwisata secara umum juga menunjukkan kecenderungan serupa. Seperti riset Rahmafitria & Purboyo (2021), yang mendiskusikan gagasan *Local Economic Development* (LED) berbasis komunitas kreatif lokal sebagai dasar dalam mengembangkan pariwisata dalam konteks regional. Riset Lasdianti et al. (2022), membahas korelasi antara pariwisata, lingkungan, serta strategi peningkatan tata kelola pembangunan infrastruktur pariwisata. Riset Shariffuddin et al. (2020) membahas mengenai tantangan kolaborasi antar *stakeholders* dalam mengembangkan destinasi pariwisata. Fokusnya pada manajemen destinasi wisata sehingga tidak menitikberatkan pada kebijakan publiknya. Riset Aqilla & Purwaningsih (2023), memberikan panduan mengenai upaya dalam meningkatkan kualitas SDM bagi wilayah pesisir. Akan tetapi panduan tersebut masih perlu dikontekstualisasikan dengan wilayah terkait, seperti misalnya Banda Neira dalam riset ini. Riset Sujadmi & Murtasidin (2020), menggambarkan konflik dalam tata kelola ruang laut Bangka Belitung, yang memiliki gambaran wilayah seperti Banda Neira yakni mayoritas lautan dan pesisir. Akan tetapi fokusnya adalah negosiasi dan kontestasi terkhusus pada sumber daya timah sebagai sumber PAD.

Terakhir, beberapa riset telah membahas terkait *stakeholders* dan kebijakan dalam pariwisata, termasuk penggunaan *policy learning*. Akan tetapi masih terdapat beberapa catatan yang disampaikan melalui penjelasan berikut. Riset Salouw (2021), menganalisis

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

stakeholders dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat beserta dengan program hasil kolaborasinya. Selain itu, juga membahas evaluasi dari masing-masing *stakeholders* tersebut namun hanya menyebutkan diksi *Public Private Partnership* pada penutup kesimpulan. Riset Firdausi et al. (2024), membahas implementasi kebijakan, namun menyoroti aspek penataan ruang publik ramah lingkungan. Sehingga analisisnya berkisar pada kebijakan-kebijakan yang menjadi payung tata kelola ruang publik di Banda Neira. Terdapat riset yang membahas mengenai *policy learning* di kawasan wisata NTB (Muttaqin & Harmawan, 2021). Namun perlu memperkaya kajian *policy learning* di tingkat mikro dan mengurai modal sosial yang dimiliki yang dimiliki oleh masyarakat di sebuah kawasan wisata, termasuk Banda Neira. Riset Rudianto et al. (2019), juga berupaya menganalisis kekayaan sumber daya sektor pariwisata Banda Neira dan strategi pengembangannya. Akan tetapi analisis dan saran yang diberikan cenderung mengarah pada sumber daya spesifik, yakni sumber daya kelautan dengan rekomendasi legal-formal, yakni integrasi pihak-pihak yang terlibat dan pembentukan peraturan baru.

Analisis terhadap kajian terdahulu dengan fokus riset yang telah dipetakan, memperkuat dan menegaskan relevansi riset ini. Sejauh ini belum ada yang membahas kebijakan pariwisata dari sudut *policy learning* menggunakan program pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, riset ini dapat melengkapi riset yang telah ada dan memberi sumbangsih secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, riset ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi dan pemahaman pada studi sosial humaniora, khususnya pada kajian kebijakan publik, tata kelola pariwisata, dan pengabdian masyarakat. Sementara secara praktis, riset ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran kebijakan bagi *stakeholders* terkait dalam merespons kebijakan yang tanggap masalah dan implementatif sehingga dapat menjadi *input* reformulasi kebijakan tata kelola pariwisata Banda Neira sebagai destinasi strategis pariwisata nasional.

KERANGKA TEORI

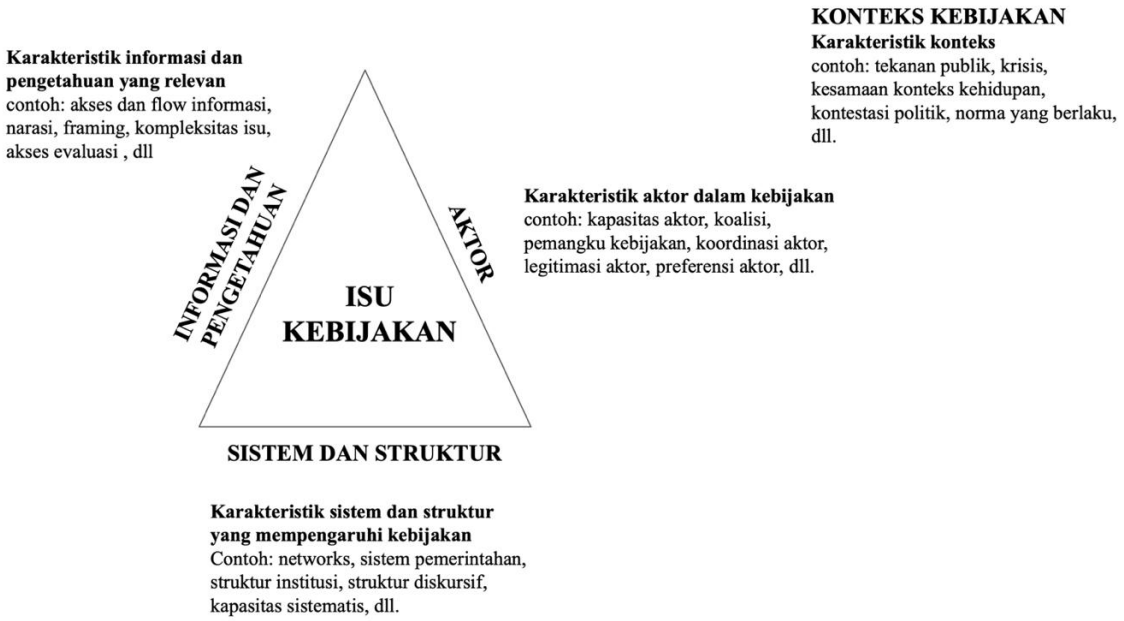
Policy learning merupakan cerminan dari kecenderungan aktor-aktor kebijakan publik untuk merancang kebijakan dengan mengacu pada pengetahuan mengenai kebijakan dan pengalaman yang telah terjadi sebelumnya (Bakir, 2017). Dalam pembahasannya, *policy learning* tidak akan lepas dari kapasitas pembelajaran pemerintah (*Governmental Learning Capacity*) (Wesley, 2013). Dalam *learning theory* versi Peter Hall, turut diadopsi pendekatan yang memasukkan aktor negara dan masyarakat sebagai agen pembelajaran yang utama. Pendapatnya mengatakan bahwa otonomi negara dari kekuatan-kekuatan masyarakat merupakan kondisi yang memungkinkan pembentukan kebijakan dicirikan oleh pembelajaran (Hall, 2011). Definisi-definisi tersebut banyak dipengaruhi oleh konsep *policy-oriented learning* dari Paul A. Sabatier yang menekankan pembaruan *beliefs and behaviors* (*attitudes, positions, and actions*) terhadap isu kebijakan (Zaki et al., 2022). Menurutnya, "*Policy-Oriented Learning is an Ongoing Process of Search and Adaptation Motivated by The Desire To Realize Core Policy Beliefs*".

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

Selain itu, *policy learning* didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang berasal dari data, informasi, dan pengalaman para aktor kebijakan, yang mengarah pada perubahan dalam cara pandang, pemikiran, dan referensi dalam memahami fenomena atau kebijakan yang ada (Dunlop & Radaelli, 2018; Moyson et al., 2017). Dalam penjelasan lain, definisi tersebut diartikan sebagai pembaruan keyakinan terhadap sebuah kebijakan yang didasarkan pada pengetahuan dan informasi tentang masalah kebijakan yang sedang dihadapi. Karena riset ini berfokus pada sebuah kebijakan publik, maka analisis kebijakan dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi permasalahan kebijakan, atau dikenal dengan istilah *ex-post analysis* (Patton et al., 2016). Analisis model ini oleh William Dunn dinamakan "*retrospective policy analysis*", yang berpusat pada analisis implementasi, *output*, dan *outcome* dari kebijakan (Dunn, 2017).

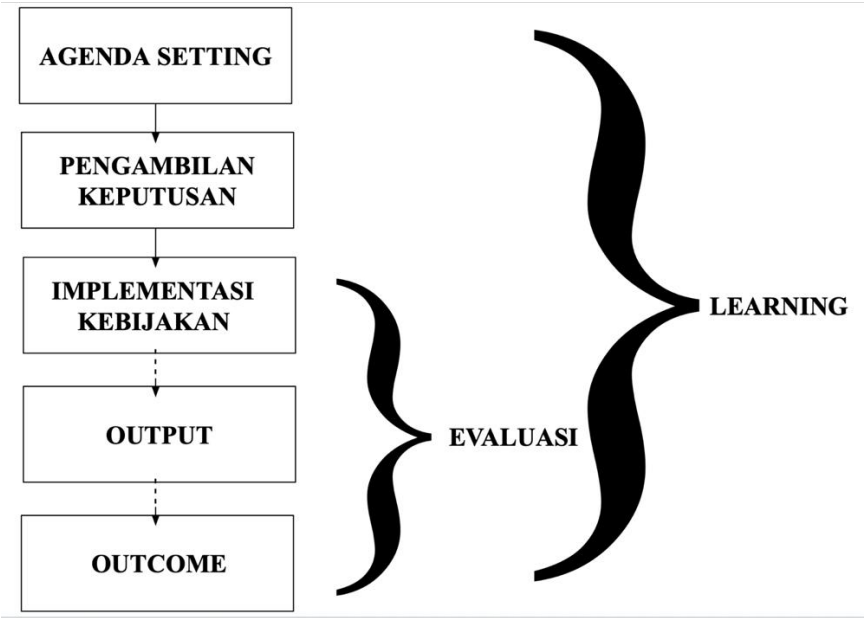
Penjelasan diatas diperkuat dengan temuan terkait *The Lessons of Policy Learning* (Dunlop & Radaelli, 2018). Dunlop & Radaelli (2018), mengemukakan bahwa terdapat tiga pelajaran penting dalam menerapkan *policy learning*. Pertama, perbedaan kualitas antar aktor dalam konteks *epistemic* (*knowledge-driven*), refleksi kebijakan, *by product of bargaining*, serta kompromi hierarki. Kedua, pentingnya memahami *tone* dari proses kebijakan itu sendiri. Para aktor kebijakan terlampau fokus pada tujuan kebijakan tertentu, bukan pada parameter yang mendefinisikan siapa melakukan apa dan bagaimana dalam proses kebijakan. Ketiga, sering kali masalahnya bukan pada *learning* itu sendiri, tetapi mengaktifkan mekanisme yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam *policy learning*, seperti misalnya menjadikan forum musyawarah dalam proses pengambilan keputusan publik sebagai formalitas semata. Oleh karena itu, aktor kebijakan perlu terus memperbarui pemahaman dan pengalaman mereka, karena *policy learning* melibatkan berbagai sumber, termasuk interaksi dengan pengambil keputusan, proses refleksi terhadap kebijakan, *bargaining*, dan hierarki. Gambaran *policy learning* dapat disarikan melalui bagan berikut.

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459



Sumber: Gambar dari Zaki et al., 2022. *A Background Conceptualization of Policy Learning. Policy Studies Organization Yearbook*, 12(1), 22.

Dalam Irawan (2021), dijelaskan bahwa *policy learning* dinilai memiliki kemiripan dengan evaluasi kebijakan karena keduanya sama-sama menilai hasil kebijakan yang telah dilakukan. Akan tetapi dalam evaluasi kebijakan, penilaiannya hanya terbatas pada *output* dan *outcome* sebuah kebijakan yang selaras dengan *input* yang telah direncanakan sebelumnya. Sementara *policy learning* melihat secara keseluruhan proses kebijakan publik yang berlangsung.



Sumber: Gambar dari Irawan, 2021. Pembelajaran dalam Siklus Kebijakan. Indonesian Journal of Political Studies, 1(2), 131.

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

Framework dalam evaluasi kebijakan cenderung menekankan pada struktur administratif yang menjadi objektif dari proses evaluasi. Struktur administratif tersebut mencakup hal-hal formal dan informal terkait dengan evaluasi, seperti *guideline*, kebijakan dan standar operasional, metodologi, serta *best-practices* (Borrás & Højlund, 2015). Selain itu, kecenderungan evaluasi kebijakan terdapat pada penilaian sistematis terhadap kinerja, efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu kebijakan yang telah atau sedang diimplementasikan. Sementara *policy learning* lebih jauh dari itu, yakni proses untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru tentang kebijakan, masalah kebijakan, dan cara mencapai tujuan kebijakan. Fokusnya tidak hanya pada kebijakan yang telah atau sedang dilaksanakan, tetapi juga efek domino atau implikasi kebijakan tersebut terhadap reformulasi kebijakan berikutnya.

Berkaca dari penjelasan diatas, hal yang perlu digarisbawahi adalah "*who sould be learning*". *Policy makers*, *policy brokers*, masyarakat, maupun *stakeholders* lain memainkan peranan yang sama pentingnya dalam siklus kebijakan publik. Terkhusus *policy makers* yang duduk sebagai pihak yang memiliki kewenangan memutar roda siklus kebijakan, juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proses *learning*. Hal tersebut dikarenakan kecenderungan yang terjadi, "yang penting selesai sesuai perencanaan dan anggaran", bukan "*what matters is what works*" dalam konteks kebijakan publik, lebih spesifik *evidence-based policy* (Sanderson, 2002). Hal tersebut diperkuat dengan kecenderungan kajian-kajian terkini tentang *policy makers* dan ranah akademik, yang mengarah pada pembahasan mengenai "*knowledge transfer*", "*knowledge brokering*", "*research utilization*", dan "*evidence-based policy*" (Newman et al., 2016). Akibatnya, kebijakan yang seharusnya *goal-driven* dan evaluasi kebijakan yang seharusnya *goal-oriented*, menjadi kehilangan ruhnya.

Padahal, *policy learning* dalam kebijakan publik dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melihat sebuah proses kebijakan publik secara holistik. Dengan kata lain, *policy learning* sudah seharusnya mengiringi setiap proses kebijakan publik. Hal ini dikarenakan *policy learning* memiliki daya jelajah yang lebih luas dibandingkan evaluasi kebijakan. *Policy learning* dinilai dapat menjadi landasan kebijakan melalui dua pendekatan utamanya, *explanandum* (apa yang ingin dijelaskan) dan *explanans* (apa yang digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu hal terjadi) (Dunlop & Radaelli, 2020). Dua instrumen tersebut dapat memberikan *pressure* bagi subjektivitas dan *conflict of interest* dalam siklus kebijakan sehingga objektif kebijakan tetap berfokus pada pembelajaran hadap masalah.

METODE

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Fokus kajian riset ini adalah upaya KKN Tematik-Kolaboratif UGM dalam mendorong *policy learning* di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Banda Neira. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi, dan studi pustaka.

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap 12 informan kunci, FGD, dan observasi. Penentuan narasumber wawancara dilakukan melalui klasterisasi latar belakang, yakni sektor pemerintahan, sektor pendidikan, dan sektor masyarakat, terdiri dari mahasiswa, dosen/akademisi tim KKN, perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah (BPK) Wilayah XX Provinsi Maluku, kepala desa di Kecamatan Banda, pelaku komunitas lokal, serta masyarakat Banda Neira. Data primer yang didapatkan dari wawancara, FGD, dan observasi merupakan data yang dikumpulkan penulis bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan KKN Tematik-Kolaboratif UGM di Banda Neira.

Adapun, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan mencari data dari kajian yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi serta situs web terpercaya dengan menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Studi literatur digunakan untuk memperoleh wawasan teoritis dan kontekstual untuk mendukung analisis data.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tiga tahap. Pertama, pengorganisasian data yang dilakukan dengan melakukan klasifikasi hasil wawancara sesuai dengan rumusan masalah riset. Kedua, identifikasi pola temuan dengan melakukan reduksi data yang kurang relevan dengan rumusan masalah riset. Ketiga, pengelompokkan data berdasarkan kategori kajian kebijakan publik, temuan lapangan, serta analisis limitasi dan tantangan. Kemudian, pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi melalui pengecekan ulang seluruh hasil temuan dari berbagai sumber data yang digunakan, yaitu wawancara, FGD, observasi, dan studi pustaka.

Berikutnya, analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang berfungsi menggambarkan dan meringkas keseluruhan data yang telah didapatkan. Data yang telah diperoleh dikritisi dan dikaji ulang untuk menemukan hubungan antara data dengan teori. Triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama (Sugiyono, 2017). Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan kerangka *policy learning* untuk mengkaji lebih dalam kebijakan penetapan Banda Neira sebagai KSPN melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi KSPN Banda Neira dan KKN Tematik-Kolaboratif UGM

Bagian ini akan menjelaskan konteks kajian ini, yaitu KSPN Banda Neira & KKN Tematik-Kolaboratif UGM. Pada bagian ini diuraikan gambaran detail tentang konsep dan cakupan KSPN Banda Neira. Selanjutnya dalam bagian ini KKN Tematik-Kolaboratif UGM dideskripsikan.

Gambaran kebijakan pariwisata Banda Neira secara makro terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pariwisata turut menyusun peraturan pendukungnya melalui Rencana

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

Strategis Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Maluku 2019-2024 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, dengan memproyeksikan Banda Neira sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta kawasan andalan pariwisata Laut Banda.

Sesuai dengan mandat pasal 3 dan 4 dalam PP Nomor 50 Tahun 2011, bahwa secara substantif, kebijakan KSPN menjadi landasan bagi pemerintah tingkat daerah untuk menyelaraskan penyusunan kebijakan yang sesuai, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, serta menghadirkan interaksi dukungan antar program pada berbagai level pemerintah. Pertimbangan utamanya adalah kebijakan pariwisata akan melibatkan berbagai sektor lain, seperti ekonomi, kesehatan, adat lokal, SDM maupun lainnya, sehingga membutuhkan dokumen kebijakan yang terkoordinasi antar programnya.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku tahun 2005-2025 tertuang agenda KSPN Banda Neira berfokus pada pengelolaan sumber daya alam kepulauan unggulan Maluku secara berkelanjutan dengan dukungan SDM dan kelembagaan yang berkualitas, infrastruktur yang maju dan merata, serta teknologi yang adaptif dan fungsional terhadap kebutuhan daerah. Hal ini didukung dengan upaya pembangunan infrastruktur perekonomian berbasis kepulauan yang memadai serta optimalisasi pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat yang tanggap transformasi teknologi di kalangan petani dan nelayan. Dengan demikian, pengembangan produk wisata menitik-beratkan pada pariwisata alam dan budaya, meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat akan tata kelola sektor pariwisata, serta menjadikan Maluku sebagai tujuan event wisata internasional.

Oleh karena itu, KKN yang dilaksanakan di Banda Neira berupaya mendorong *policy learning* untuk menciptakan ruang bagi pertukaran pengetahuan dan optimalisasi kebijakan publik dengan mendayagunakan pilar-pilar tridharma perguruan tinggi. Seyogianya, tridharma perguruan tinggi tidak diurai dan dilepaskan satu sama lain, melainkan diintegrasikan dalam "satu tarikan nafas". Artinya, proses pendidikan diselenggarakan berbasis riset melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga rangkaian proses belajar tersebut hendaknya dijiwai sebagai sarana silang transfer pengetahuan bersama masyarakat sebagai wujud kolaborasi penyelesaian masalah sosial.

Melalui KKN yang dilaksanakan di wilayah Banda Neira, UGM berupaya mengintegrasikan pelaksanaan program dengan tiga nilai, berkomitmen mengintegrasikan tridharma perguruan tinggi secara kesinambungan; berlandaskan pada tiga level kompetensi mahasiswa, sebagaimana yang dirumuskan oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri yaitu *Student*, *Institutions of Higher Education*, *The Community*; serta ditopang *Epistemic Community* yaitu kelompok kaum profesional dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan bagi pengambilan kebijakan publik tentang isu-isu teknis tertentu (Hardjasoemantri, 1982).

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

KKN di Banda Neira berfokus sebagai *platform* aktivasi *policy learning* secara praktis, menjadi sarana analisis kebijakan KSPN dan upaya mendorong *policy learning* sebagai implikasi dari kebijakan tersebut. Upaya tersebut didasarkan pada pemahaman *learning* sebagai "*process of updating beliefs about public policy, refer to beliefs on how to make policy more efficient, legitimate, democratic*" (Dunlop & Radaelli, 2018). Hal tersebut juga difungsikan sebagai bentuk integrasi tridharma perguruan tinggi sehingga memungkinkan lahirnya *input* kebijakan sebagai landasan reformulasi kebijakan yang lebih strategis, transparan, dan akuntabel[1]. Dengan demikian, interaksi yang terjalin tidak hanya membangun kolaborasi, tetapi juga menjadi cikal bakal terciptanya inovasi kebijakan yang berkelanjutan, yang mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pariwisata di Banda Neira.

Pendekatan Top-Down dan Dampak Kebijakan Yang Tidak Kontekstual

Potensi sumber daya sektor pariwisata Banda Neira, mulai dari wisata alam, jejak kekayaan perkebunan pala, hingga situs-situs bersejarah yang menjadi saksi imperialisme dan kolonialisme, belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Kehadiran sektor pariwisata dinilai belum memprioritaskan masyarakat lokal dan hanya dinikmati dampaknya pada waktu-waktu tertentu, seperti saat ada penyelenggaraan event atau acara adat. Padahal dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa SDM pariwisata merupakan pondasi penting dari empat pilar pariwisata dan kebutuhan akan perubahan arah pariwisata dari *mass tourism* menjadi *sustainable tourism*. RUU tersebut juga menegaskan bahwa pariwisata berbasis budaya dan masyarakat lokal harus dikedepankan dalam pengembangan kawasan wisata. Penyelenggaraan kepariwisataan tidak boleh menggeser dimensi sosio-kultural, norma agama, adat istiadat, dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Temuan riset dari FGD yang dilakukan bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan BPK Wilayah XX Provinsi Maluku menghasilkan beberapa catatan. Inisiasi forum yang membahas mengenai konteks sosial, budaya, dan historis Maluku, khususnya Banda Neira tersebut membuka ruang dialog mengenai tata kelola potensi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Banda Neira sekaligus menjadi sarana menemukenali masalah. Rangkaian upaya menemukenali masalah ini tidak hanya menjadi medium untuk memperluas wawasan, tetapi juga membangun sinergi yang antara berbagai lembaga guna mendukung keberlanjutan kegiatan KKN.

Dari FGD bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, poin penting yang tercatat terkait dengan kepribadian orang Banda saat bertemu dengan orang baru. Orang Banda cenderung lebih defensif dan tidak mudah membuka informasi kepada orang lain, terutama orang baru. Hal ini disebabkan mayoritas warga yang saat ini menempati wilayah Banda Neira bukan merupakan keturunan asli Banda setelah kejadian Genosida Banda oleh kongsi dagang VOC Belanda pada tahun 1621. Hasil diskusi tersebut juga ditemukan

[1] Disampaikan saat rangkaian pembekalan materi dan informasi terkait lokasi kepada tim KKN Tematik-Kolaboratif UGM

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

saat turun ke lapangan sehingga perlu waktu lebih untuk menggali informasi dari masyarakat Banda.

Sementara saat melaksanakan FGD bersama BPK Wilayah XX Provinsi Maluku, terdapat kutipan menarik saat diskusi berlangsung, "*Banda sekarang secara konstruk sosialnya cenderung dianggap sebagai tempat 'buangan' di kalangan ASN*"[2]. Keterisolasian Banda secara akses transportasi dan kebutuhan peningkatan kualitas SDM belum dipandang sebgai tantangan dalam pembangunan. Akibatnya, status masyarakat Banda seolah dipandang terpisah dengan statusnya sebagai masyarakat kepulauan dalam kacamata kebijakan publik.

Disamping itu, pernyataan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan, apalagi jika melihat potensi Banda Neira yang sampai dijadikan prioritas sumber PAD Provinsi Maluku. Salah satu isu krusial yang perlu digarisbawahi adalah keterbatasan infrastruktur, dimana kondisi aksesibilitas, transportasi, akomodasi, dan sanitasi di Banda Neira masih membutuhkan peningkatan signifikan untuk memenuhi standar kebutuhan pariwisata modern. Akibatnya, ketidakseimbangan ekonomi lokal menjadi risiko tak terhindarkan, yang menyebabkan ketimpangan pendapatan antara pelaku pariwisata dalam skala besar dan masyarakat lokal serta memunculkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat pariwisata.

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Melalui *event* internasional Sail Banda, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional. Sail Banda merupakan *event* internasional yang termasuk dalam rangkaian agenda Sail Indonesia dengan mengadakan perlombaan *yacht* atau kapal layar tahunan di Maluku dengan mengambil pelaut pesaing dari Darwin, Australia dengan rute perjalanan dari Darwin, Australia menuju Kepulauan Banda (Ambon, 2018).

Sayangnya, *event* sekaliber Sail Banda yang diselenggarakan pada tahun 2010 tersebut belum mampu berbicara banyak. Sail Banda digadang-gadang dapat mempromosikan daerah serta meningkatkan pendapatan daerah. Akan tetapi, riset yang dilakukan pasca penyelenggaraan event Sail Banda menunjukkan ketiadaan dampak peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal (Tanasale, 2013). Data pendapatan masyarakat sekitar hutan Banda berada di angka Rp8.420.278/tahun atau sekitar 700 ribu rupiah per bulan (Latar & Kastanya, 2023).

Ironinya lagi, berdasarkan data BPS Maluku tentang jumlah penduduk miskin menurut kabupaten, tingkat kemiskinan Kabupaten Maluku Tengah menjadi yang tertinggi selama dua tahun terakhir di seluruh Provinsi Maluku (BPS Provinsi Maluku, 2024). Padahal tingkat kunjungan wisatawan ke wilayah Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, maupun Provinsi Maluku terus mengalami peningkatan sejak pandemi covid-19 mulai

[2] kutipan saat FGD tim KKN dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XX Provinsi Maluku yang membahas mengenai konteks sosial, budaya, dan historis Maluku, khususnya Banda Neira

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

mereda (BPS Provinsi Maluku, 2025). Syahdan, sejalan dengan temuan riset terdahulu yang mencatat hanya satu dari empat tujuan penyelenggaraan *event* Sail Banda yang tercapai, yakni peningkatan kunjungan wisatawan di Kecamatan Banda (Ambon, 2018). Masyarakat Banda Neira menyoroti beberapa faktor penyebab defisit dampak dari penyelenggaraan *event* tersebut, diantaranya kondisi infrastruktur yang kurang baik, minimnya pelibatan masyarakat, waktu penyelenggaraan yang relatif singkat di Banda Neira dari keseluruhan rangkaian *event*, dan perputaran ekonomi penyelenggaraan *event* yang tidak memberikan efek domino bagi masyarakat Banda Neira.

Selain itu, hampir setiap tahun pemerintah juga menyelenggarakan event Banda Panggil Pulang untuk memperingati pertukaran Pulau Run (Banda Neira, Indonesia) dengan Pulau Manhattan (New York, USA) dalam Perjanjian Breda. Bahkan pada tahun 2024, event tahunan tersebut dikerangkai dengan nama Banda Neira Festival (BNF) karena menjadi satu-satunya perwakilan Provinsi Maluku dalam daftar Kharisma Event Nusantara (KEN). KEN sendiri merupakan inisiasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama pemerintah daerah dan seluruh *stakeholders* pariwisata dalam rangka optimalisasi citra pariwisata Indonesia serta sebagai penggerak kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Akan tetapi, event-event yang diselenggarakan sebagai upaya optimalisasi keistimewaan Banda Neira dalam kebijakan KSPN tersebut belum mampu menyentuh level *awareness* masyarakat. Contoh ilustrasi tentang masyarakat yang kurang sadar akan kegiatan KSPN terlihat pada tata kelola pasca kegiatan, seperti soal sampah. Selain ketergantungannya pada mobilitas wisatawan, sektor yang selalu mengagungkan pemberdayaan ekonomi tersebut (re:pariwisata) menjadi salah satu produsen sampah bagi lingkungan. Kasus Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Banda Neira menarik diperhatikan karena awalnya hanya dijadikan TPA sementara. Akan tetapi, hingga sepuluh tahun lebih berlalu tidak ada tindak lanjut mengenai permasalahan sampah tersebut.

Pengakuan dari salah satu kepala desa di Kecamatan Banda, setiap pertemuan atau kunjungan yang melibatkan instansi pemerintah tingkat kabupaten, provinsi, anggota dewan, hingga kementerian juga terlampau sering membahas sampah. Alih-alih mempercepat proses pemindahan TPA, instansi yang berwenang menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa memastikan tahun ini akan selesai proses pemindahan seperti target awal. Dalihnya, masih terdapat beberapa urusan yang belum terselesaikan, seperti pembebasan lahan. Padahal sejak 3 tahun yang lalu, telah dibangun fasilitas umum rumah sakit tepat di depan TPA tersebut. Bahkan, pengakuan dari "orang yang paling dipercaya" sebagai operator eskavator TPA, hal tersebut belum cukup memberikan tekanan kepada pihak terkait untuk segera menindaklanjuti permasalahan lokasi TPA meskipun sampah telah menggunung hingga menutup area jalan yang menyebabkan aktivitas lalu lintas masyarakat terganggu.

Hasil *assessment* awal KKN menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata yang diterapkan di Banda Neira sering kali mengabaikan peran serta dan kebutuhan masyarakat lokal. Meskipun tujuan utama kebijakan tersebut sebagai motor penggerak pertumbuhan

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta melestarikan keindahan alam dan budaya setempat, realisasinya justru menyebabkan marginalisasi masyarakat dan komunitas lokal. Banyak inisiatif pengembangan pariwisata yang dijalankan tanpa melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini menciptakan ketimpangan antara keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pariwisata dan manfaat yang diterima oleh masyarakat lokal.

Padahal, keterlibatan masyarakat lokal menjadi elemen penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi kunci untuk keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan kebijakan (Santoso, 2010). Selain itu, masyarakat dan komunitas lokal menjadi dua unsur penting dalam upaya mendukung keberlanjutan budaya dan partisipasi lokal (Rossi, 2016). Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan pariwisata masih cukup minim sehingga menimbulkan eksklusivitas kebijakan. Evaluasi kebijakan yang efektif seharusnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan terpenuhi. Namun, di Banda Neira, proses evaluasi kebijakan cenderung dilakukan secara *top-down* tanpa adanya mekanisme partisipatif. Hal ini menyebabkan evaluasi kebijakan tidak mencerminkan realitas dan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan kurang sensitif terhadap konteks lokal (Dye, 2013).

Tata Kelola Pariwisata Banda Neira dan Upaya-Upaya Aktivasi *Policy Learning*

Catatan dari riset ini menemukan bahwa institusi sosial, baik dalam bentuk kelembagaan, seperti kelompok pemuda desa, komunitas literasi, komunitas sekolah informal, komunitas *diving* dan konservasi bawah laut, maupun pranata sosial seperti *baku bantu* (gotong royong) dan tradisi adat buka kampung, merupakan modal sosial yang khas bagi masyarakat Banda Neira. Keberadaan komunitas-komunitas berbasis lokal ini memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan di bidang pariwisata. Namun, peranan komunitas-komunitas tersebut dalam upaya mendorong *policy learning* kebijakan KSPN di Banda Neira masih meninggalkan banyak catatan akibat kurang terkoordinirnya tata kelola sektor pariwisata. Akibatnya, berbagai macam inisiasi kegiatan yang dilakukan hanya berjalan selama periode tertentu dan tidak berkelanjutan.

Selain itu, upaya yang didorong masyarakat melalui pembentukan koperasi, seperti koperasi nelayan, juga belum berjalan optimal. Kurangnya kemampuan manajerial dan akuntabilitas dalam mengelola koperasi menjadi hal yang patut dijadikan pembelajaran dari kurang optimalnya upaya tersebut. Catatan penting lainnya adalah efek domino yang dirasakan masyarakat tidak hanya defisit dari sisi ekonomi, tetapi juga kualitas SDM yang cenderung memiliki *mindset* sebagai pekerja, bukan pembuka lapangan kerja dengan mengoptimalkan potensi pariwisata daerah. Ujungnya, masyarakat lokal kurang *aware* dengan kebutuhan membangun jaringan bisnis serta mendorong inisiasi modal bersama sebagai prasyarat menjadi "pengelola sumber daya" di rumah sendiri.

Aktivasi *policy learning* dari kegiatan KKN juga menjadi pemantik dalam membangkitkan partisipasi aktif masyarakat lokal serta menciptakan sinergi yang

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

memudahkan proses pengumpulan data mengenai potensi dan tantangan pariwisata di wilayah tersebut. Salah satu penerapannya adalah melalui forum bersama yang mengintegrasikan beberapa komunitas lokal dalam satu payung untuk membahas tata kelola pariwisata Banda Neira sebelum lebih jauh menyusun agenda peta jalan pariwisata Banda Neira berbasis masyarakat lokal. Hasilnya, berbagai masalah pariwisata Banda Neira mulai teridentifikasi dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan komunitas diprioritaskan berbasis kolaborasi, seperti pameran "Jejak Sejarah Langkah Kaki: Menata Banda Neira sebagai Living Museum" yang didukung BPK wilayah XX Maluku serta rangkaian *walking tour* yang dikhususkan bagi siswa.

Sementara itu, catatan lain dari hasil riset dalam hal tata kelola pariwisata, seperti yang dikatakan oleh Farid (2020), memberikan sorotan terhadap pengelolaan warisan sejarah Banda Neira. Banda Neira menyimpan segudang warisan sejarah, mulai dari rumah-rumah peninggalan kolonial, benteng pertahanan, rumah pengasapan pala, klenteng cina abad ke-17, gereja Holland abad ke-18, masjid tua abad ke-19, dan beberapa rumah kuno khas budaya melayu-arab. Akan tetapi, pelestarian warisan-warisan sejarah tersebut belum dikelola secara maksimal. Donkersgoed (2019), mencatat bahwa banyak perdebatan yang muncul akibat perbedaan interpretasi tentang sejarah Banda Neira dan perbedaan metode pelestariannya oleh para pihak terkait. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam merumuskan persepsi kolektif mengenai upaya pelestarian warisan sejarah Banda Neira.

Handoko & Mansyur (2013) juga mencatat deretan permasalahan dalam pengelolaan wisata sejarah di Banda Neira, seperti bangunan sejarah yang rusak atau tidak terawat karena kurang maksimalnya program pemugaran Benda Cagar Budaya (BCB); atensi dan program pemerintah dalam melestarikan bangunan kolonial masih bersifat parsial tanpa koordinasi sehingga pihak diluar pemerintah (seperti yayasan atau lembaga swasta lain) berjalan sesuai dengan kepentingan masing-masing; ketidakjelasan status kepemilikan BCB; serta kurangnya optimalisasi promosi wisata. Sementara Akyuwen (2021), mengungkapkan bahwa ketidakhadiran pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pemanfaatan potensi wisata sejarah di Banda Neira.

Temuan ini sejalan dengan hasil riset di lapangan yang menunjukkan bahwa, meskipun terdapat sejumlah tokoh lokal yang berinisiatif melakukan penataan dan pemanfaatan potensi wisata sejarah, upaya tersebut masih bersifat individual dan sporadis. Kondisi ini semakin menegaskan absennya peran kelembagaan dalam mengelola potensi wisata di wilayah tersebut secara terstruktur dan berkelanjutan. Akibatnya, potensi wisata sejarah di Banda Neira tidak hanya terabaikan, tetapi juga gagal memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini juga menegaskan "label-label spesial" yang diberikan, seperti nominasi warisan dunia (*world heritage*) oleh UNESCO dan kebijakan KSPN belum berhasil menjadi *trigger* pihak terkait dalam merumuskan program-program pembangunan Banda Neira sebagai destinasi pariwisata yang tidak meninggalkan nilai-nilai sejarah dan budaya.

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

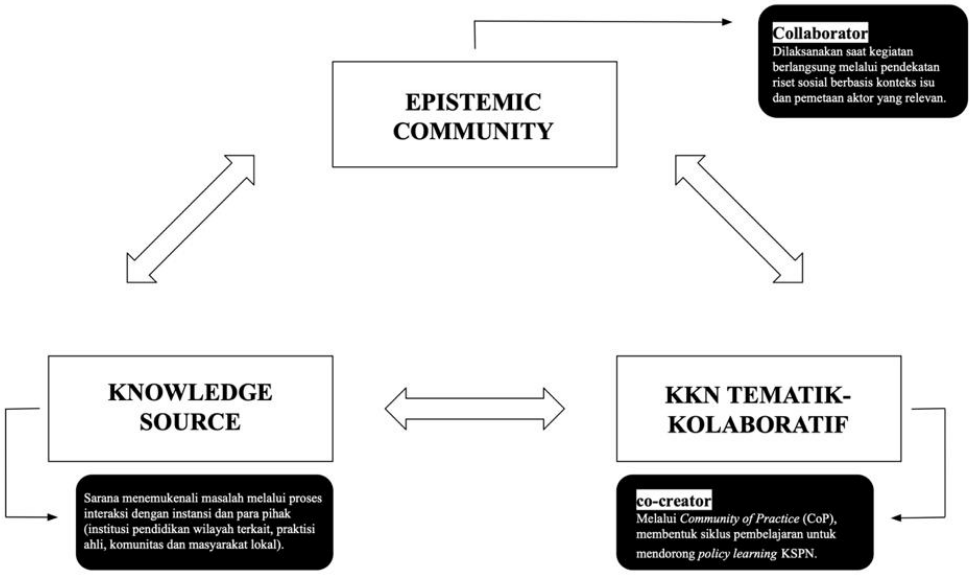
Menatap Masa Depan Pariwisata Banda Neira: Sebuah Refleksi

Dengan potensi yang begitu menjanjikan, berbagai tantangan masih menjadi penghambat pengembangan pariwisata Banda Neira. Tantangan-tantangan ini menciptakan limitasi dalam berbagai aspek yang salah satu hulunya adalah kapasitas masyarakat lokal. Kurangnya pemahaman mengenai tata ruang dan prinsip-prinsip pariwisata menyebabkan dominasi suara dalam forum-forum diskusi sering kali hanya berasal dari segelintir orang yang memiliki kuasa. Gap dalam hal pengetahuan tersebut makin mempertegas kesenjangan kultural dan kurangnya SDM yang terampil untuk mengelola sektor pariwisata secara integratif dari temuan hasil riset.

Hal ini diperburuk dengan ketergantungan pada pemerintah, dimana inisiatif-inisiatif masyarakat seringkali bergantung pada dukungan regulasi dan anggaran dari pihak pemerintah. Inkonsistensi dalam prioritas kebijakan juga semakin menghambat realisasi inisiatif-inisiatif tersebut. Akibatnya, potensi sektor pariwisata belum dikembangkan secara optimal karena fasilitas penunjang pariwisata, seperti akomodasi, transportasi, dan infrastruktur lainnya, masih terbatas.

Selain itu, terdapat limitasi dari internal tim KKN sendiri. Orientasi pelaksanaan kegiatan KKN yang berbasis integrasi tridharma perguruan tinggi serta anggota tim dari lintas disiplin ilmu menjadikan pemahaman yang didapat tentu memiliki keterbatasan satu sama lain. Daya tangkap dari proses silang transfer pengetahuan dengan berbagai *stakeholders* selama di lapangan turut menjadi catatan bahwa integrasi internal tim dari lintas disiplin ilmu seharusnya dipetakan dengan lebih baik dari jauh-jauh hari.

Limitasi tersebut masih ditambah dengan keterbatasan jangka waktu pelaksanaan. Meskipun telah dirancang sedemikian rupa, seperti gambar dibawah ini, upaya mendorong *policy learning* hingga mencapai titik *critical juncture* menekankan aspek keberlanjutan dalam hal kegiatan dan pembelajaran.



Sumber: Metode Pelaksanaan KKN (Kontributor Penulis, 2025)

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

Dalam studi *policy learning*, pembahasan mengenai waktu mendapat perhatian tersendiri. Rietig (2018) yang berargumen agar *policy learning* dapat terjadi maka membutuhkan *evidence of reflection* turut mempertanyakan "*What are the implications of this for how long we study a policy*?". Riset-riset terkini mengenai *policy learning* memang memiliki kecenderungan pergeseran ke arah *modes of learning more reflexivity* (Zeitlin and Verdun, 2019). Dampaknya, *learning* dan proses kebijakan publik harus lebih dinamis, kreatif, dan adaptif.

Tantangan soal waktu dalam *policy learning* menghasilkan tiga pendekatan utama, yakni *linier*, *non-linier*, dan *circadian* (Dunlop & Radaelli, 2020). Pendekatan *linier* mengandaikan *policy learning* dalam kebijakan yang bertahap dan polanya dapat diprediksi. Sebaliknya, *non-linier* lebih bersifat kontekstual dan bergantung pada dinamika sosial politik di wilayah kebijakan yang mengatur. Sementara *circadian* cenderung lebih kompleks karena menekankan bahwa *policy learning* tidak hanya bertahap tetapi juga berulang seperti siklus dengan pola tertentu. Dalam konsep *circadian*, sifatnya cenderung multi-level dan multi-dimensional sehingga dapat berlangsung simultan di beberapa tempat dan waktu.

Dalam tulisannya, Dunlop & Radaelli (2020) juga membahas mengenai *turning point* atau momen kritis dalam *policy learning*. Momen kritis tersebut terjadi saat kebijakan mulai kehilangan relevansinya sehingga menyebabkan disorientasi dan ambiguitas yang memungkinkan munculnya cara berpikir baru dan perubahan kebijakan. *Policy learning* yang efektif memang mengandaikan proses kebijakan publik dianalisis secara mendalam dalam konteks yang spesifik, termasuk lingkungan, institusi, dan administrasi yang relevan. Oleh karena itu, *policy learning* bukan hanya tentang memahami kebijakan, tetapi juga memahami dinamika yang terjadi di balik proses *learning* dan perubahan kebijakan.

Lebih lanjut, tulisan ini akan membahas momen kritis *policy learning* dalam kebijakan KSPN melalui kacamata *critical juncture*. *Critical juncture* mengacu pada situasi ketidakpastian yang membuat para aktor kebijakan mengambil keputusan secara kausal dari sebuah *status quo* menuju *status quo* baru (Capoccia, 2016). Dalam konteks KSPN di Banda Neira terdapat beberapa hal yang patut mendapat sorotan. Mulai dari reformulasi dan pengawalan implementasi kebijakan, *continuous learning*, serta keberlanjutan kegiatan sejenis KKN. Reformulasi kebijakan dan pengawalan implementasinya ditujukan untuk menyasar isu konektivitas dan aksesibilitas, tanggung jawab pengelolaan cagar budaya, serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Kemudian, *continuous learning* secara spesifik mengarahkan kecenderungannya pada masyarakat lokal. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lokal diproyeksikan menjadi "bos di tanah sendiri" yang ditegaskan dalam pasal 29 ayat 9 RIPPANAS, bahwa pariwisata harus dikembangkan sebagai investasi pengetahuan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat. Terakhir, *support* kegiatan-kegiatan sejenis yang selama ini banyak berkecimpung di Banda Neira, seperti pengabdian masyarakat, *volunteer*, atau yang lainnya, dapat difokuskan pada isu-isu yang berkaitan

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

dengan tata kelola pariwisata Banda Neira. Tujuannya, kegiatan-kegiatan eksternal yang dilaksanakan di Banda Neira dapat mengakselerasi optimalisasi tata kelola pariwisata Banda Neira serta memberdayakan masyarakat dengan meminimalisir biaya sekaligus menekankan aspek keberlanjutan.

Selain itu, beberapa faktor yang turut berpengaruh dalam menentukan perkembangan tata kelola pariwisata Banda Neira diantaranya faktor keamanan dan konservasi lingkungan. Faktor keamanan menjadi faktor yang perlu diperhatikan karena kekhawatiran terhadap residu konflik sosial yang pernah terjadi di Ambon. Sementara faktor konservasi lingkungan dapat menjadi ancaman nyata tujuan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) karena eksploitasi sumber daya. Banda Neira juga perlu memposisikan diri sebagai destinasi yang tanggap perkembangan pariwisata, teknologi, serta preferensi wisatawan, meskipun tata kelola pariwisata tidak harus mutlak mengikuti hal-hal tersebut karena masih banyak pertimbangan lain dalam proses mengambil keputusan yang strategis terkait pengembangan pariwisata.

Riset ini juga menemukan bahwa masyarakat menganggap pembangunan wilayah di daerah Maluku yang bergantung pada pucuk pimpinan merupakan rahasia umum. Pembangunan di daerah Maluku, cenderung memprioritaskan peta politik perwakilan daerah. Misalnya, saat ini tidak ada perwakilan anggota dewan atau pejabat pemerintah daerah yang berasal dari daerah Banda, tidak usah banyak berharap lima tahun kedepan akan banyak pembangunan di Banda. Masyarakat hanya bisa berharap pemerintah desa atau kecamatan memiliki kesabaran dan koneksi lebih untuk berupaya memperjuangkan pembangunan daerah. Dampaknya, tidak sedikit masyarakat Banda Neira yang memilih merantau atau mengenyam pendidikan diluar Banda Neira kemudian tidak kembali lagi karena pengelolaan potensi daerah yang jalan ditempat. Hal ini menegaskan bahwa masih banyak tumpukan pekerjaan rumah dari tata kelola sektor pariwisata di Banda Neira yang harus dikerjakan oleh para *stakeholders* terkait.

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

PENUTUP

Tata kelola pariwisata Banda Neira membutuhkan solusi yang melibatkan berbagai pihak (*multi-stakeholders*) dan kebijakan di berbagai tingkatan (*multi-level*) dari hulu hingga hilir. Tata kelola sektor pariwisata mesti benar-benar diperhatikan dan proses-proses pengembangannya harus dilakukan dengan memberikan prioritas manfaat bagi masyarakat lokal sebagai insan pariwisata yang menghidupkan pariwisata di daerahnya. Dalam kasus Banda Neira, tata kelola pariwisata dinilai cukup tertinggal karena masalah aksesibilitas dan konektivitas, dukungan sarana tempat tinggal bagi wisatawan, dan lemahnya *good will* pemerintah (Koritelu, 2024). Dengan memanfaatkan potensi sumber daya pariwisata yang ada, masyarakat Banda Neira tidak hanya dapat melestarikan tradisi dan budaya lokal, tetapi juga mengoptimalisasi sumber daya di suatu daerah serta memberdayakan secara ekonomi melalui pengalaman pembelajaran kebijakan tata kelola pariwisata.

Kenyataannya, deretan kebijakan pariwisata Banda Neira yang telah dirancang untuk meningkatkan daya tarik wisatawan sekaligus melestarikan lingkungan alamnya belum memberikan dampak yang mensejahterakan masyarakat. Banda Neira menyimpan potensi pariwisata sejarah dan budaya yang sangat besar dan bahkan dikenal sebagai ikon wisata budaya wilayah Maluku (Surbakti, 2021). Potensi pariwisata sejarah dan budaya tersebut dapat dilihat dari jajaran bangunan peninggalan masa kolonial, baik berupa rumah tinggal, benteng, rumah pengasingan, rumah pengasapan pala (*perk*), tempat peribadatan, dan bangunan lainnya (Kastanya, 2016; Anuraga, 2021).

Dokumen-dokumen kebijakan juga telah memberikan gambaran bahwa sektor pariwisata yang mandiri dan berkelanjutan seharusnya menekankan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan SDM, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Fokus sektor pariwisata pada ranah bahari serta budaya juga merupakan wujud upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta media promosi Maluku sebagai destinasi wisata nasional maupun internasional dengan dukungan infrastruktur serta aksesibilitas yang terjangkau. Oleh karena itu, visi pengembangan KSPN Banda Neira seharusnya dapat mengangkat potensi daerah yaitu pariwisata berbasis sejarah dan optimalisasi sumber daya daerah, dalam hal ini sektor pariwisata.

Pada akhirnya, tanpa publik atau masyarakat, proses kebijakan publik akan kering dan sangat kental dengan nuansa teknokratis. Secara teoritis, riset ini menegaskan bawa kebijakan publik harus senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Maka dari itu, pembelajaran dalam kebijakan KSPN Banda Neira diatas menjadi *warning* bagi kebijakan-kebijakan lain yang sudah maupun akan diimplementasikan. Pembelajaran tersebut merupakan catatan penting agar sebuah kebijakan tidak terjerumus dalam jurang *policy failures*, yang dikelompokkan oleh Patton et al. (2016) menjadi dua, yaitu *program failures* (kebijakan tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan desain) dan *theory failure* (kebijakan dapat diimplementasikan sesuai desain, tetapi tidak memberikan hasil yang diharapkan), sehingga "mengorbankan" masyarakat. Chand & Vivek (2012), menyatakan bahwa

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

"*tourism activities can only be sustainable if implemented with a common understanding and consensus-based approach to development*".

Oleh karena itu, mendorong *policy learning* dalam kebijakan pariwisata KSPN Banda Neira menjadi sebuah keniscayaan. Hal tersebut dikarenakan riset ini secara praktis telah menjadi pemantik *interest* dari *stakeholders* terkait melalui kerangka *policy learning*. *Interest* tersebut dimunculkan melalui *awareness* terhadap keterbatasan kapasitas pengelolaan, baik waktu maupun SDM. Hal ini telah dimulai dengan inisiasi yang didorong UGM melalui KKN tematik-kolaboratif, yang juga menjadi sarana implementasi tridharma perguruan tinggi, secara terstruktur bersama berbagai *stakeholders* terkait di Banda Neira. Upaya-upaya optimalisasi kebijakan melalui *policy learning* oleh masyarakat, komunitas, maupun institusi pendidikan tersebut perlu diintegrasikan untuk mendorong optimalisasi tata kelola pariwisata Banda Neira secara holistik. Dengan demikian, masyarakat lokal sebagai tuan rumah dapat berperan penting dalam tata kelola sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat seperti yang disampaikan MacRae dan Wilde, yakni *informed citizens can be their own policy analyst* (Patton et al., 2016).

Dari temuan riset, dapat direfleksikan apabila pemerintah tidak cukup hanya menjalankan tugasnya melalui koordinasi lapisan kebijakan secara paralel dengan memberikan panduan kebijakan yang diturunkan menjadi produk kebijakan pada level pemerintahan di bawahnya. Lebih dari itu, pemerintah turut memiliki tanggung jawab untuk melakukan learning sebagai bentuk *exercise* dari *government learning capacity*. Hal ini menjadi catatan penting untuk melengkapi limitasi dan tantangan yang ditemukan setelah melakukan upaya aktivasi *policy learning* pada kebijakan KSPN di Banda Neira. Limitasi dan tantangan seperti kebutuhan peningkatan kualitas SDM melalui *continuous learning*, *concern* terhadap waktu sebagai prasyarat keberlanjutan, serta pemahaman konteks untuk merespon kompleksitas dinamika lapangan, dapat menjadi ruang bagi riset berikutnya yang hendak mengambil lokus kebijakan publik pada sektor pariwisata di Banda Neira.

DAFTAR PUSTAKA

Akyuwen, M. W. (2021). Pelaksanaan Perlindungan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Pariwisata Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. *Skripsi.* Universitas Gadjah Mada.

Ambon, M. I. R. (2018). Dampak dari event Sail Banda 2010 terhadap perkembangan wilayah Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.

Amri, K., Wahidar, T. I., Fuadi, A., Saputra, T., & Nastasya. M. (2023). Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dalam Peningkatan PAD Sektor Pariwisata Di Pesisir Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Niara, 16*(2), 307-313.

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

Anuraga, J. L. Y. (2021). Jalur Rempah Banda, antara Perdagangan, Penaklukan dan Percampuran: Dinamika Masyarakat Banda Neira dilihat dari Sosio-Historis Ekonomi rempah. *Jurnal Masyarakat dan Budaya, 23*(3).

Aqilla, M. J., & Purwaningsih, E. A. (2023). Strategi Peningkatan Sdm Pesisir Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan, 6*(2), 211–217. https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.31685.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku. (2024, 30 Juli). *Statistik Daerah Provinsi Maluku 2024*. Diakses pada 27 Januari 2025 dari https://maluku.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIxIzI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten.html.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku. (2025, 2 Januari). *Perkembangan Pariwisata Maluku November 2024*. Diakses pada 27 Januari 2025 dari https://maluku.bps.go.id/id/infographic?id=422

Bakir, C. (2017). Policy learning and policy change: learning from research citations. *Policy Sciences, 50*(4), 585–597. https://doi.org/10.1007/s11077-017-9299-8

Borrás, S., & Højlund, S. (2015). Evaluation and policy learning: The learners' perspective. *European Journal of Political Research, 54*(1), 99-120.

Chand, M., & Vivek. (2012). Residents' perceptions towards sustainable tourism development in Manali region. *South Asian Journal of Tourism and Heritage, 5*(1), 157–178.

Capoccia, G. (2016). Critical Junctures in Orfeo Fioretos, Tulia G. Falleti, and Adam Sheingate (eds), *The Oxford Handbook of Historical Institutionalism*. USA: Oxford University Press.

Dimuru, A. H. L. (2023). Pengembangan Destinasi Pariwisata Pantai Di Pulau Hatta Kecamatan Banda Naira. *Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2*(7), 3005-3020.

Donkersgoed, J. V. (2019). Virtual meeting ground for colonial (re)interpretation of the Banda Islands, Indonesia. *Jurnal Wacana, 20*(2), 266-285.

Dunlop, C. A., & Radaelli, C. M. (2018). The lessons of policy learning: Types, triggers, hindrances and pathologies. *Policy and Politics, 46*(2), 255–272. https://doi.org/10.1332/030557318X15230059735521

Dunlop, C. A., & Radaelli, C. M. (2020). Policy Learning in Comparative Policy Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 24*(1), 51-72.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. London: Pearson Education.

Eliza, Y., Maryanti, S., Muslim, I., Cahyadi, I., & Andria, Y. (2023). Pengelolaan Wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Padang. *JILPI: JURNAL ILMIAH PENGABDIAN DAN INOVASI, 2*(1), 95-104.

Farid, M. (2020). Pelestarian Warisan Sejarah Melalui Sinergi Antar-Stakeholder dan Digitalisasi Warisan Sebagai Model Pengembangan Pariwisata Banda Naira. *KAMBOTI: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1*(1), 44-58.

Firdausi, H., Rahawarin, M. A., & Selanno, H. (2024). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Publik Ramah Lingkungan Pada Kawasan Cagar Budaya Banda. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4*(2), 7012-7025.

Hall, C. M. (2011). Policy learning and policy failure in sustainable tourism governance: From first-and second-order to third-order change?. *Journal of sustainable tourism*, *19*(4-5), 649-671. https://doi.org10.1080/09669582.2011.55555

Handoko, W., & Mansyur, S. (2013). Persepsi Masyarakat dan Peta Konflik dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB) di Banda Neira, Maluku Tengah. Kapata Arkeologi: *Jurnal Arkeologi Wilayah Maluku dan Maluku Utara, 6*(10), 50-70.

Hardjasoemantri, K. (1982). *Study-service as a subsystem in Indonesian higher education*. Jakarta: Balai Pustaka.

Herman, W. (2024, 4 Maret). *Pemprov Maluku prioritaskan pariwisata Banda Naira jadi sumber PAD*. Diakses pada 31 Januari 2025 dari https://www.antaranews.com/berita/3995154/pemprov-maluku-prioritaskan-pariwisata-banda-naira-jadi-sumber-pad

Irawan, F. S. (2021). Policy Learning dalam Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah: Insight dari Gunungkidul. *Indonesian Journal Of Political Studies, 1*(2), 128-152.

Kastanya, H. (2016). Refleksi cultural imperialism dalam penggunaan bahasa media luar ruang di Kepulauan Banda Naira, Maluku Tengah. *TOTOBUANG: Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan, 4*(1), 41-53.

Koritelu, P. (2024). Perubahan Sosial Orang Banda Neira dalam Konteks Pariwisata Unggul di Banda. *Indonesia Berdaya: Journal of Community Engagement, 5*(1), 203-214. https://doi.org/10.47679/ib.2024683

Lasdianti, S. G., Salahudin, & Saiman (2022). Studi Pembangunan Infrastruktur Pariwisata. *Jurnal Kawistara, 12*(3), 341-353.

Latar, C. F., & Kastanya, A. (2023). Potret Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Sekitar Hutan (Kasus Pulau Banda Besar) Kecamatan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Penelitian Kehutanan: Makila, 17*(2), 102-114. https://doi.org/10.30598/makila.v17i2.5233

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 ISSN: 2549-7502
E-ISSN: 2828-8459

Masrurun, Z. Z & Nastiti, D. M. (2023). Analisis Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia, 17*(1) 99-118.

Moyson, S., Scholten, P., & Weible, C. M. (2017). Policy learning and policy change: Theorizing their relations from different perspectives. *Policy and society*, *36*(2), 161-177.

Mugni & Murdana, M. (2023). Desa Wisata Competitiveness in the National Tourism Strategic Area (KSPN), Jerowaru; A case study of pare mas Lombok Timur. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 13(2), 112-120.

Muttaqin, M. Z. & Harmawan, B. N. (2021). West Nusa Tenggara Tourism Policy Learning Responding to the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan, 5*(2), 83-95.

Newman, J., Cherney, A., & Head, B. W. (2016). Do Policy Makers Use Academic Research? Reexamining the "Two Communities" Theory of Research Utilization. *Public Administration Review*, *76*(1), 24-32.

Patton, C. V, Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2016). *Basic methods of policy analysis and planning (3rd ed.)*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Pentury, G. M., Risambessy, A., Sijabat, A., Leuhery, F., & Latuconsina Z. (2023). Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Sadar Wisata Yang Berbasis Potensi Daerah Di Kampung Baru Banda Neira. *Community Development Journal, 4*(4), 9439-9446.

Rahmafitria, F., & Purboyo, H. (2021). The integration of local creativity-based tourism by the LED approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 683*(1).

Refualu, T. D., Tetelepta, J. M. S., & Abrahamsz, J. (2024). Analisis Isu Strategis Pengelolaan Ruang Pesisir di Banda Neira. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 20(1) 73-87.

Rietig, K. (2018). *Learning in the European Commission's renewable energy policy-making and climate governance* in Dunlop, C.A., Radaelli, C.M. and Trein, P. (eds) Learning in Public Policy: Analysis, Modes and Outcomes. Basingstoke: Palgrave.

Rossi, J. (2016). *Community Viability and Marine Conservation: Hybrid Resource Management and the Role of the Coral Triangle Center on Pulau Ay, Indonesia*. Capstone Collection. 2888. https://digitalcollections.sit.edu/capstones/2888

Rudianto, Putra, A. A., Akbar, Z. F., & Putri, A. (2020). A Strategic Plan For Developing The Banda Archipelago As An Ecotourism And Environmental Conservation Areas . *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis, 11*(3), 697-711. https://doi.org/10.29244/jitkt.v11i3.23861

Volume 12, Nomor 02 , September 2026 **ISSN: 2549-7502**
E-ISSN: 2828-8459

Salouw, E. (2021). Implementasi Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus Pada Kepulauan Banda). *Jurnal Pariwisata Pesona, 6*(1), 81-94.

Sanderson, I. (2002). Evaluation, Policy Learning, and Evidence-Based Policy Making. *Public Administration*, *80*(1), 1-22.

Santoso, P. (2010). *Analisis kebijakan publik* (*Modul Pembelajaran*). Yogyakarta: Research Center for Politics and Government.

Shariffuddin, N. S. M., Zain, W. M. A. W. M., & Azinuddin, M. (2020). Collaborative Challenges among Stakeholders on Tourism Destination Competitiveness. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13*(1), 454-466.

Setiawan, Z., Amarrohman, F. J., & Firdaus, H. S. (2023). Analisis Nilai Tanah Akibat Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. *Jurnal Geodesi Undip, 12*(2), 91-100.

Sujadmi, S., & Murtasidin, B. (2020). Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *5*(2), 163-173. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514

Sugiyono (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, K. (2021). Pemanfaatan tinggalan kolonial di Pulau Neira, Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah sebagai upaya preservasi cagar budaya. *Forum Arkeologi, 34*(1), 51-66.

Tanasale, H. L. J. (2013). Mega Event Sail Banda 2010: Perangkat Pembangunan Kembali Kota Ambon Pasca Konflik. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wesley, A. (2013). Book Reviews: Chris Argyris and Donald A. Schön (1996): Organizational learning II: Theory, method and practice. *Asia Pacific Journal of Human Resources, 36*(1), 107-109. https://doi.org/10.1177/103841119803600112

Wiryasa, N. M. A., W. P., Preantjaya, & Warsika, D. (2018). Analisis Kelembagaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Bali. *Jurnal Spektran, 6*(1), 105-110.

Zaki, B., Wayenberg, E., & George, B. (2022). A systematic review of policy learning : tiptoeing through a conceptual minefield. *Policy Studies Organization Yearbook*, *12*(1), 1-52. https://doi.org/10.18278/psy.12.1.2

Zeitlin, J. and Verdun, A. (eds) (2019). *EU Socio-Economic Governance since the Crisis: The European Semester in Theory and Practice*. London: Routledge.